



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 3035-3041

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Efisiensi dan Efektivitas Anggaran Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah Pasca 2025

Shela Kustia Nilasari¹, Fajar Sriningsih², Rahmiati³, Theresia Mentari⁴

^{1,2,3,4}Universitas Palangka Raya

¹shelakustianilasari@gmail.com, ²aris.tewel@gmail.com, ³rahmiati@feb.upr.ac.id, ⁴theresiamentari@feb.upr.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efisiensi dan efektivitas anggaran dalam pelaksanaan program pasca kebijakan efisiensi anggaran tahun 2025 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk memperoleh gambaran secara mendalam mengenai pengelolaan anggaran setelah diterapkannya kebijakan efisiensi pemerintah. Data penelitian diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi yang melibatkan pegawai Sub Bagian Keuangan dan Aset serta Sub Bagian Penyusunan Program. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sedangkan keabsahan data diuji menggunakan teknik triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan efisiensi anggaran menyebabkan penurunan anggaran instansi dari Rp37.226.748.895,99 pada tahun 2025 menjadi Rp19.705.804.203,31 pada tahun 2026. Kondisi tersebut mendorong instansi melakukan berbagai langkah efisiensi, seperti pengurangan perjalanan dinas, pembatasan kegiatan rapat dan kegiatan seremonial, pengurangan biaya operasional, serta pemanfaatan teknologi digital dalam administrasi dan koordinasi kerja. Meskipun terjadi penurunan anggaran, program prioritas seperti Paskibraka, Gema Pancasila, sosialisasi nilai kebangsaan, pembinaan organisasi masyarakat, dan kerukunan umat beragama tetap dapat dilaksanakan. Namun, beberapa kegiatan mengalami penyesuaian dan pengurangan akibat keterbatasan anggaran. Selain itu, kebijakan efisiensi juga berdampak terhadap motivasi dan produktivitas pegawai akibat pemotongan tunjangan dan berkurangnya intensitas kegiatan kerja. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan efisiensi anggaran mampu meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran, namun efektivitas pelaksanaan program masih perlu ditingkatkan melalui perencanaan anggaran yang lebih terarah dan pengelolaan sumber daya manusia yang optimal.

Kata kunci: Efisiensi Anggaran, Efektivitas Program, Pengelolaan Keuangan Daerah

1. Latar Belakang

Pemerintah Indonesia terus melakukan berbagai upaya untuk menjaga stabilitas fiskal dan meningkatkan kualitas belanja negara melalui penerapan kebijakan efisiensi anggaran. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah melalui penerbitan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 [1]. Kebijakan tersebut mengarahkan seluruh instansi pemerintah agar melakukan penghematan belanja serta memprioritaskan penggunaan anggaran secara tepat sasaran guna meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan negara dan daerah. Penerapan kebijakan efisiensi anggaran juga menjadi bagian dari perubahan paradigma pengelolaan keuangan publik agar kinerja organisasi pemerintah dapat berjalan lebih optimal melalui pola kerja yang lebih adaptif dan efisien [2].

Dalam pengelolaan sektor publik, efisiensi dan efektivitas merupakan dua indikator utama yang digunakan untuk menilai keberhasilan penggunaan anggaran. Efisiensi berkaitan dengan kemampuan organisasi dalam memanfaatkan sumber daya secara optimal dengan biaya seminimal mungkin, sedangkan efektivitas menunjukkan tingkat keberhasilan organisasi dalam mencapai target dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran efisiensi dan efektivitas menjadi penting karena kedua aspek tersebut dapat menunjukkan kualitas pengelolaan keuangan daerah melalui realisasi anggaran dan pencapaian program kerja yang telah direncanakan [3].

Pengelolaan keuangan daerah yang baik tidak hanya berorientasi pada penghematan anggaran, tetapi juga harus mampu menjaga kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, setiap perangkat daerah dituntut mampu mengelola anggaran secara transparan, akuntabel, efektif, dan efisien agar pelaksanaan program tetap berjalan optimal meskipun berada dalam keterbatasan fiskal [4]. Kualitas pengelolaan keuangan daerah juga memiliki hubungan erat dengan kemampuan pemerintah daerah dalam menentukan prioritas belanja serta menjaga kinerja fiskal daerah secara berkelanjutan [5].

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa efisiensi dan efektivitas anggaran masih menjadi indikator penting dalam menilai kinerja instansi pemerintah [6], [7]. Rasio efektivitas dan efisiensi dapat digunakan sebagai alat ukur dalam mengevaluasi kinerja keuangan instansi pemerintah melalui laporan realisasi anggaran yang disesuaikan dengan target yang telah ditetapkan [8]. Selain itu, efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah juga berpengaruh terhadap kualitas dan keandalan laporan keuangan pemerintah daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban publik [9]. Penelitian lain menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah pada beberapa pemerintah daerah telah berjalan cukup efektif, namun efisiensi belanja masih perlu ditingkatkan agar penggunaan anggaran menjadi lebih optimal dan tepat sasaran [10].

Kebijakan efisiensi anggaran pada dasarnya bertujuan untuk mendorong penggunaan belanja daerah yang lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada program prioritas. Dalam implementasinya, efisiensi dilakukan melalui pengurangan belanja yang dianggap kurang prioritas, pengendalian biaya operasional, serta penyesuaian alokasi anggaran sesuai kebutuhan organisasi dan kondisi fiskal daerah [11]. Namun demikian, penerapan kebijakan efisiensi anggaran sering kali dihadapkan pada dilema antara upaya penghematan belanja dan pencapaian target program yang telah direncanakan sebelumnya. Pengurangan anggaran dapat meningkatkan efisiensi secara nominal, tetapi belum tentu diikuti dengan peningkatan efektivitas pelaksanaan program maupun kualitas pelayanan publik.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah merupakan salah satu perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas politik daerah, memperkuat pembinaan ideologi Pancasila, menjaga kerukunan umat beragama, serta melakukan pembinaan organisasi masyarakat. Dengan diterapkannya kebijakan efisiensi anggaran pasca tahun 2025, instansi ini dituntut mampu melakukan penyesuaian penggunaan anggaran tanpa mengurangi kualitas pelaksanaan program dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam kondisi tersebut, efisiensi penggunaan anggaran harus tetap diimbangi dengan efektivitas pelaksanaan program agar tujuan organisasi dapat tercapai secara optimal. Penggunaan anggaran sektor publik perlu dinilai tidak hanya dari sisi penghematan biaya, tetapi juga dari kemampuan organisasi dalam mempertahankan kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat [12].

Meskipun berbagai penelitian mengenai efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah telah banyak dilakukan, sebagian besar penelitian sebelumnya masih berfokus pada pengukuran kinerja keuangan melalui rasio anggaran dan belum banyak mengkaji secara spesifik dampak kebijakan efisiensi anggaran pasca tahun 2025 terhadap pelaksanaan program pada organisasi perangkat daerah. Selain itu, penelitian yang membahas hubungan antara efisiensi penggunaan anggaran dan efektivitas pelaksanaan program pada instansi pemerintah daerah juga masih relatif terbatas. Padahal, evaluasi terhadap kedua aspek tersebut penting dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kebijakan efisiensi anggaran mampu mendukung pencapaian tujuan organisasi tanpa menurunkan kualitas pelayanan publik maupun produktivitas aparatur pemerintah.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui kondisi nyata pengelolaan anggaran setelah diterapkannya kebijakan efisiensi anggaran tahun 2025 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efisiensi dan efektivitas anggaran dalam pelaksanaan program pasca kebijakan efisiensi anggaran tahun 2025. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pengelolaan anggaran daerah serta menjadi bahan evaluasi dalam perumusan kebijakan keuangan daerah yang lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menganalisis secara mendalam efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah pasca diterapkannya kebijakan efisiensi anggaran tahun 2025. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada kondisi nyata yang terjadi di lapangan serta bertujuan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai proses pengelolaan anggaran dalam suatu instansi pemerintah. Sementara itu, metode studi kasus digunakan karena penelitian terfokus pada objek yang spesifik, sehingga memungkinkan peneliti mengkaji fenomena secara mendalam sesuai dengan kondisi organisasi yang sebenarnya.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan pihak yang terlibat dalam pengelolaan anggaran, yaitu pegawai pada Sub Bagian Keuangan dan Aset serta Sub Bagian Penyusunan Program. Adapun data sekunder diperoleh melalui dokumentasi berupa Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA), serta laporan realisasi anggaran yang berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan instansi.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi mengenai penerapan kebijakan efisiensi anggaran, dampaknya terhadap pelaksanaan program kerja, serta berbagai kendala yang dihadapi selama proses pelaksanaan kegiatan. Sementara itu, dokumentasi digunakan sebagai data pendukung untuk melengkapi dan memperkuat hasil wawancara yang diperoleh di lapangan.

Analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih dan menyederhanakan data yang relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data disajikan secara sistematis agar memudahkan proses pemahaman dan interpretasi data. Tahap terakhir dilakukan melalui penarikan kesimpulan berdasarkan hasil analisis yang telah diperoleh.

Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan hasil wawancara dengan data dokumentasi yang tersedia. Teknik ini dilakukan agar data yang diperoleh memiliki tingkat validitas dan keakuratan yang lebih baik.

3. Hasil dan Diskusi

3.1. Hasil

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pegawai pada Sub Bagian Keuangan dan Aset serta Sub Bagian Penyusunan Program, diperoleh informasi bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah mengalami perubahan yang cukup signifikan dalam pengelolaan keuangan instansi setelah diterapkannya kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pada tahun 2025. Kebijakan tersebut memberikan dampak langsung terhadap alokasi anggaran, pelaksanaan program kerja, pola koordinasi organisasi, hingga sistem kerja pegawai dalam menjalankan tugas sehari-hari.

Hasil dokumentasi menunjukkan bahwa total anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2025 sebesar Rp37.226.748.895,99 mengalami penurunan menjadi Rp19.705.804.203,31 pada tahun 2026. Penurunan tersebut menunjukkan adanya pengurangan anggaran dalam jumlah yang cukup besar sehingga memengaruhi hampir seluruh bidang kerja di lingkungan instansi.

Tabel 1. Perbandingan Anggaran Tahun 2025 dan 2026

Tahun	Total Anggaran
2025	Rp37.226.748.895,99
2026	Rp19.705.804.203,31

Sumber: Data Dokumentasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah, 2026.

Penurunan anggaran tersebut menyebabkan setiap bidang harus melakukan penyesuaian terhadap rencana kerja yang telah disusun sebelumnya. Berdasarkan hasil wawancara, beberapa kegiatan yang sebelumnya dirancang dalam skala besar harus dikurangi baik dari sisi jumlah kegiatan, lokasi pelaksanaan, maupun jumlah peserta yang terlibat. Selain itu, beberapa kegiatan yang dianggap tidak terlalu prioritas juga mengalami penundaan pelaksanaan hingga kondisi anggaran dinilai lebih memungkinkan.

Perubahan alokasi anggaran tersebut juga mendorong instansi untuk melakukan evaluasi internal terhadap seluruh program kerja yang telah direncanakan. Evaluasi dilakukan melalui pembahasan antarbidang guna menentukan kegiatan yang memiliki tingkat urgensi tinggi dan memberikan dampak langsung terhadap pencapaian tujuan organisasi. Dalam proses tersebut, setiap bidang diminta menyusun kembali skala prioritas kegiatan agar penggunaan anggaran tetap efektif dan tepat sasaran sesuai arah kebijakan pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil wawancara, kondisi keterbatasan anggaran menyebabkan instansi lebih selektif dalam menentukan program yang akan dilaksanakan. Program yang berkaitan langsung dengan pembinaan ideologi Pancasila, penguatan wawasan kebangsaan, pembinaan organisasi masyarakat, dan kerukunan umat beragama tetap diprioritaskan karena dianggap memiliki dampak strategis terhadap stabilitas sosial dan politik daerah. Sementara itu, beberapa kegiatan pendukung mengalami penyesuaian baik dari sisi teknis pelaksanaan maupun alokasi pembiayaannya.

Dalam pelaksanaannya, instansi menerapkan berbagai langkah efisiensi pada sektor operasional. Kebijakan efisiensi tersebut dilakukan sebagai upaya untuk menyesuaikan penggunaan anggaran tanpa menghentikan pelaksanaan program prioritas organisasi.

Tabel 2. Bentuk Kebijakan Efisiensi Anggaran

No	Bentuk Efisiensi	Keterangan
1	Pemotongan tunjangan pegawai	Pengurangan tunjangan daerah sebesar 30%
2	Pengurangan perjalanan dinas	Pembatasan perjalanan dinas sebesar 50%
3	Pembatasan kegiatan hotel	Kegiatan lebih diarahkan di kantor
4	Pengurangan konsumsi rapat	Penyesuaian biaya operasional rapat
5	Rapat daring	Pemanfaatan media digital untuk koordinasi
6	Digitalisasi administrasi	Penggunaan sistem digital dalam administrasi
7	Pembatasan kendaraan dinas	Pengurangan penggunaan fasilitas operasional
8	Work from home	Diterapkan pada kondisi tertentu

Sumber: Hasil Wawancara Penelitian, 2026.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa bentuk efisiensi yang paling dirasakan pegawai adalah pengurangan perjalanan dinas dan pemotongan tunjangan daerah. Sebelumnya, perjalanan dinas menjadi salah satu kegiatan yang cukup sering dilakukan untuk mendukung koordinasi program dan kegiatan antarwilayah. Namun setelah diterapkannya kebijakan efisiensi, intensitas perjalanan dinas mengalami penurunan yang cukup signifikan sehingga berbagai koordinasi mulai dialihkan melalui sistem daring.

Selain itu, pembatasan pelaksanaan kegiatan di hotel juga menyebabkan perubahan mekanisme pelaksanaan rapat dan sosialisasi kegiatan. Sejumlah kegiatan yang sebelumnya dilaksanakan di luar kantor mulai dialihkan ke lingkungan kantor atau menggunakan fasilitas pemerintah daerah lainnya. Langkah tersebut dilakukan untuk mengurangi biaya operasional yang dinilai cukup besar apabila kegiatan tetap dilaksanakan di hotel atau tempat pertemuan komersial.

Penerapan kebijakan efisiensi juga mendorong terjadinya perubahan pola kerja pegawai. Berdasarkan hasil wawancara, penggunaan media digital dalam pelaksanaan administrasi dan koordinasi kerja menjadi lebih intensif dibandingkan sebelumnya. Rapat koordinasi antarbidang yang sebelumnya dilaksanakan secara langsung mulai banyak dilakukan melalui aplikasi pertemuan daring. Selain itu, pengiriman dokumen administrasi juga mulai menggunakan sistem digital guna mengurangi penggunaan kertas dan biaya operasional lainnya.

Perubahan sistem kerja tersebut pada awalnya menimbulkan berbagai kendala dalam pelaksanaannya. Beberapa pegawai mengaku mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri terhadap penggunaan teknologi digital, terutama bagi pegawai yang belum terbiasa menggunakan aplikasi administrasi dan rapat daring. Selain itu, pelaksanaan koordinasi secara daring dinilai memiliki keterbatasan dibandingkan pertemuan langsung, khususnya dalam penyampaian informasi yang memerlukan pembahasan secara detail.

Meskipun demikian, secara bertahap pegawai mulai mampu beradaptasi dengan perubahan sistem kerja tersebut. Berdasarkan hasil wawancara, sebagian pegawai menilai bahwa penggunaan sistem digital justru membantu mempercepat proses administrasi dan koordinasi karena lebih fleksibel serta mampu mengurangi waktu perjalanan dinas. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan efisiensi secara tidak langsung mendorong percepatan digitalisasi sistem kerja di lingkungan instansi pemerintah.

Selain berdampak pada pola kerja organisasi, kebijakan efisiensi juga memengaruhi kondisi psikologis dan motivasi kerja pegawai. Beberapa informan menyampaikan bahwa pemotongan tunjangan daerah sebesar 30% menimbulkan keluhan karena berpengaruh terhadap pendapatan pegawai. Di sisi lain, berkurangnya jumlah kegiatan menyebabkan intensitas aktivitas kerja pada beberapa bagian menjadi menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Namun demikian, sebagian pegawai tetap berupaya menjaga kualitas pelaksanaan tugas agar target organisasi tetap dapat tercapai. Hal tersebut terlihat dari upaya setiap bidang dalam melakukan penyesuaian program kerja serta mempertahankan pelaksanaan kegiatan prioritas meskipun berada dalam kondisi keterbatasan anggaran.

Berdasarkan hasil dokumentasi dan wawancara, target kinerja instansi pada tahun 2026 tetap mengacu pada dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029. Akan tetapi, capaian program pada triwulan I tahun 2026 belum berjalan optimal karena sebagian kegiatan baru dijadwalkan pada triwulan IV. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perubahan anggaran juga memengaruhi jadwal pelaksanaan program dan distribusi kegiatan selama satu tahun anggaran.

Meskipun mengalami penurunan anggaran, beberapa program prioritas instansi tetap dapat dilaksanakan sesuai dengan target utama organisasi.

Tabel 3. Program Prioritas yang Tetap Dilaksanakan

No	Program Prioritas	Status Pelaksanaan
1	Paskibraka	Tetap dilaksanakan
2	Gema Pancasila	Tetap dilaksanakan
3	Sosialisasi nilai kebangsaan	Tetap dilaksanakan
4	Pembinaan organisasi masyarakat	Tetap dilaksanakan
5	Kerukunan umat beragama	Tetap dilaksanakan

Sumber: Hasil Wawancara dan Dokumentasi Penelitian, 2026.

Berdasarkan hasil wawancara, penetapan skala prioritas menjadi strategi utama instansi dalam menjaga keberlangsungan program prioritas di tengah keterbatasan anggaran. Program yang dinilai memiliki dampak langsung terhadap stabilitas sosial dan politik daerah tetap dipertahankan, sedangkan kegiatan pendukung mengalami pengurangan maupun penyesuaian pelaksanaan. Beberapa program pada Bidang Ketahanan Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Karakter Bangsa menjadi bidang yang mengalami penyesuaian cukup besar akibat keterbatasan anggaran dan perubahan prioritas kegiatan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kebijakan efisiensi anggaran tidak hanya berdampak pada aspek pengurangan belanja daerah, tetapi juga memengaruhi sistem kerja organisasi, pola koordinasi antarbidang, pelaksanaan program kerja, serta kondisi motivasi pegawai di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah. Kebijakan efisiensi mendorong instansi untuk lebih selektif dalam menentukan prioritas program, meningkatkan pemanfaatan teknologi digital, serta melakukan penyesuaian pola kerja agar pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan secara optimal meskipun berada dalam keterbatasan anggaran.

3.2. Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kebijakan efisiensi anggaran pasca tahun 2025 memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap pengelolaan keuangan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah. Penurunan anggaran pada tahun 2026 mencerminkan adanya upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas belanja daerah melalui pengurangan pengeluaran yang dianggap kurang prioritas. Kondisi tersebut tidak hanya memengaruhi besaran anggaran yang diterima instansi, tetapi juga berdampak pada proses perencanaan, pelaksanaan, serta penyesuaian program kerja pada setiap bidang agar tetap selaras dengan target organisasi dan kondisi fiskal daerah. Temuan ini menunjukkan bahwa kebijakan efisiensi anggaran menjadi salah satu strategi pemerintah dalam mendorong penggunaan anggaran yang lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran sesuai prioritas pembangunan daerah [13].

Penurunan anggaran yang cukup besar menyebabkan instansi harus melakukan berbagai penyesuaian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya. Setiap bidang dituntut untuk menyusun kembali skala prioritas program agar kegiatan yang dianggap strategis tetap dapat dilaksanakan meskipun berada dalam keterbatasan anggaran. Dalam kondisi tersebut, instansi lebih memfokuskan penggunaan anggaran pada program yang memiliki dampak langsung terhadap pencapaian tujuan organisasi, sedangkan kegiatan yang bersifat pendukung mengalami pengurangan maupun penyesuaian pelaksanaan. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah yang efisien memerlukan kemampuan organisasi dalam menentukan prioritas belanja sesuai kebutuhan dan target organisasi yang ingin dicapai [14].

Bentuk efisiensi yang diterapkan instansi lebih banyak diarahkan pada pengurangan belanja operasional, seperti biaya perjalanan dinas, konsumsi rapat, kegiatan seremonial, penggunaan kendaraan dinas, serta pembatasan pelaksanaan kegiatan di hotel. Selain itu, instansi juga melakukan pemotongan tunjangan daerah pegawai dan menerapkan sistem kerja yang lebih fleksibel melalui pelaksanaan rapat secara daring serta penggunaan sistem digital dalam administrasi dan koordinasi kerja. Langkah tersebut menunjukkan bahwa efisiensi tidak hanya dilakukan melalui pengurangan nominal belanja, tetapi juga melalui perubahan pola kerja organisasi agar lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kondisi keterbatasan anggaran. Pemanfaatan teknologi digital dalam administrasi dan koordinasi kerja menjadi salah satu bentuk inovasi yang mampu mendukung penghematan biaya operasional tanpa menghentikan pelaksanaan program prioritas organisasi. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa efisiensi pengelolaan keuangan daerah dapat dilakukan melalui pengendalian belanja dan penggunaan anggaran secara tepat sasaran [15].

Beberapa pos belanja yang mengalami dampak cukup signifikan dalam penerapan kebijakan efisiensi meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta dana hibah. Pengurangan pada beberapa pos tersebut dilakukan sebagai upaya untuk mengalihkan alokasi anggaran kepada kegiatan yang dinilai lebih prioritas dan memiliki pengaruh langsung terhadap pencapaian tujuan organisasi. Dalam kondisi keterbatasan fiskal, organisasi dituntut

untuk mampu melakukan penyesuaian terhadap kebutuhan belanja agar penggunaan anggaran tetap mendukung keberlangsungan program strategis daerah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan efisiensi anggaran mendorong organisasi pemerintah untuk menerapkan manajemen prioritas dalam pengelolaan program dan kegiatan agar penggunaan sumber daya menjadi lebih efektif dan efisien.

Meskipun anggaran mengalami penurunan yang cukup signifikan, beberapa program prioritas instansi tetap dapat dilaksanakan sesuai target utama organisasi. Program seperti Paskibraka, Gema Pancasila, sosialisasi nilai-nilai kebangsaan, pembinaan organisasi masyarakat, dan kerukunan umat beragama tetap berjalan sebagai bentuk upaya mempertahankan efektivitas pelayanan dan fungsi organisasi di tengah keterbatasan anggaran. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas organisasi masih dapat dipertahankan melalui penyesuaian jadwal kegiatan, pengurangan kegiatan pendukung, serta fokus pada program utama yang dianggap memiliki tingkat urgensi lebih tinggi. Akan tetapi, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa capaian program pada awal tahun belum berjalan optimal karena sebagian kegiatan baru dijadwalkan pada triwulan IV sehingga pelaksanaan program belum sepenuhnya merata sepanjang tahun anggaran.

Di sisi lain, penerapan kebijakan efisiensi juga memberikan dampak terhadap kondisi internal organisasi, khususnya berkaitan dengan motivasi dan produktivitas pegawai. Hasil wawancara menunjukkan bahwa pemotongan tunjangan daerah sebesar 30% menimbulkan keluhan dari sebagian pegawai karena berpengaruh terhadap pendapatan yang diterima. Selain itu, berkurangnya jumlah kegiatan menyebabkan intensitas aktivitas kerja pada beberapa bagian menjadi menurun dibandingkan kondisi sebelum penerapan kebijakan efisiensi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan efisiensi anggaran mampu mempertahankan efektivitas organisasi pada aspek eksternal, khususnya keberlangsungan program prioritas, namun belum sepenuhnya mampu menjaga efektivitas internal organisasi yang berkaitan dengan kesejahteraan, motivasi kerja, dan produktivitas aparatur.

Program yang mengalami pengurangan umumnya merupakan kegiatan pendukung, terutama pada Bidang Ketahanan Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Karakter Bangsa. Pengurangan tersebut dilakukan karena instansi perlu menyesuaikan pelaksanaan kegiatan dengan kemampuan anggaran yang tersedia. Dalam kondisi tersebut, organisasi lebih memfokuskan alokasi anggaran pada program yang memiliki dampak lebih besar terhadap pencapaian tujuan organisasi dan stabilitas sosial politik daerah. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan kebijakan efisiensi mendorong organisasi untuk lebih selektif dalam menentukan program prioritas agar program inti tetap dapat berjalan secara optimal meskipun berada dalam keterbatasan sumber daya [16].

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kebijakan efisiensi anggaran berhasil menekan belanja operasional sekaligus mempertahankan keberlangsungan program prioritas organisasi. Namun demikian, kebijakan tersebut juga memberikan konsekuensi terhadap pola kerja organisasi, kesejahteraan pegawai, serta dinamika pelaksanaan program di lingkungan instansi. Efisiensi anggaran tidak hanya berdampak pada aspek penghematan fiskal, tetapi juga mendorong perubahan budaya kerja organisasi melalui peningkatan pemanfaatan teknologi digital dalam administrasi dan koordinasi kerja. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan anggaran yang lebih terarah, pengelolaan sumber daya manusia yang optimal, serta penetapan prioritas program yang lebih seimbang agar efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran dapat berjalan secara beriringan dalam mendukung kinerja organisasi pemerintah daerah.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan kebijakan efisiensi anggaran pasca tahun 2025 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan anggaran telah berjalan cukup baik. Hal tersebut terlihat dari berbagai langkah penghematan yang dilakukan, seperti pengurangan perjalanan dinas, pembatasan kegiatan rapat, pengurangan biaya operasional, serta pemanfaatan teknologi digital dalam administrasi dan koordinasi kerja. Meskipun terjadi penurunan anggaran, beberapa program prioritas seperti Paskibraka, Gema Pancasila, sosialisasi nilai kebangsaan, pembinaan organisasi masyarakat, dan kerukunan umat beragama tetap dapat dilaksanakan sesuai target instansi. Namun, dari sisi efektivitas pelaksanaan program, belum seluruh kegiatan dapat berjalan secara optimal karena adanya keterbatasan anggaran yang menyebabkan penundaan dan penyesuaian beberapa program. Selain itu, kebijakan efisiensi juga berdampak pada motivasi kerja pegawai akibat pemotongan tunjangan dan berkurangnya intensitas kegiatan pada beberapa unit kerja. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan anggaran yang lebih terarah, evaluasi berkala, serta pengelolaan sumber daya manusia yang lebih optimal agar efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran dapat berjalan secara seimbang.

Referensi

- [1] Republik Indonesia, “Inpres No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025,” Database Peraturan | JDIIH BPK. Diakses: 13 Mei 2026. [Daring]. Tersedia pada: <http://peraturan.bpk.go.id/Details/313401/inpres-no-1-tahun-2025>
- [2] R. Puspitaningtyas dan N. Endrayanto, “Paradigma Baru Pengelolaan Keuangan Negara: Perubahan Cara Kerja dalam Rangka Peningkatan Kinerja Organisasi,” *Jurnal Manajemen Keuangan Publik*, vol. 7, no. 1, hlm. 59–73, Jun 2023, doi: 10.31092/jmkp.v7i1.2302.
- [3] N. Fadhila dan J. S. Tanjung, “Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Berdasarkan Value For Money,” *Bursa : Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, vol. 1, no. 2, hlm. 126–134, Mei 2022, doi: 10.59086/jeb.v1i2.50.
- [4] M. Edowati, H. Abubakar, dan M. Said, “Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai,” *Indonesian Journal of Business and Management*, vol. 4, no. 1, hlm. 87–96, Des 2021, doi: 10.35965/jbm.v4i1.1184.
- [5] A. Iskandar, “Analisis Kemandirian Keuangan Daerah dan Potensi Pertumbuhan Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan Tahun 2017–2021,” *Jurnal Manajemen Keuangan Publik*, vol. 7, no. 1, hlm. 1–25, Jun 2023, doi: 10.31092/jmkp.v7i1.2118.
- [6] I. Harinda dan S. Sapari, “Analisis Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Value For Money,” *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, vol. 8, no. 2, Des 2019, Diakses: 13 Mei 2026. [Daring]. Tersedia pada: <https://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/246>
- [7] M. C. Retnosari, C. Suryawati, dan P. Harto, “Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Anggaran di RSUP Dr. Kariadi Semarang,” *Jurnal Manajemen Kesehatan Indonesia*, vol. 10, no. 3, hlm. 231–240, Des 2022, doi: 10.14710/jmki.10.3.2022.231-240.
- [8] N. E. Makaminang, “Evaluasi Efektivitas dan Efisiensi dalam Laporan Realisasi Anggaran pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Manado,” *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)*, vol. 6, no. 1, hlm. 325–334, Jul 2022.
- [9] S. Suhendro, “Pengaruh Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Keandalan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah,” *Jurnal Akuntansi dan Keuangan (JAK)*, vol. 29, no. 2, hlm. 148–155, Jul 2024, doi: 10.23960/jak.v29i2.2574.
- [10] Budiandriani, S. W. A. Aqzah, S. R. Razak, dan M. Nurnajamuddin, “Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah di Kota Makassar,” *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, vol. 7, no. 3, hlm. 721–731, Mar 2025, doi: 10.47467/alkharaj.v7i3.5574.
- [11] P. Parlindungan dan E. Nainggolan, “Analisis Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi Dalam Mengoptimalkan Pengendalian Biaya Operasional,” *Bursa : Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, vol. 3, hlm. 135–144, Des 2024, doi: 10.59086/jeb.v3i3.585.
- [12] D. Yuliati, A. E. Handayani, dan N. Nurhayati, “Evaluasi Kinerja Keuangan Dengan Metode Value for Money Pada Operasi dan Pemeliharaan SDA II Balai Besar Wilayah Sungai Brantas,” *Journal of Accounting and Finance Management*, vol. 6, no. 6, hlm. 3726–3731, Feb 2026, doi: 10.38035/jafm.v6i6.3074.
- [13] Y. A. Sapay, F. Mas’ud, G. L. Pandu, A. S. Nuak, E. Y. Indah, dan S. L. A. Kian, “Kebijakan Pemangkasan Anggaran di Indonesia: Efisiensi Fiskal dan Kepentingan Politik,” *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, vol. 2, no. 3, hlm. 312–327, Okt 2025, doi: 10.71153/jimmi.v2i3.297.
- [14] N. Suoth, J. Tinangon, dan S. Rondonuwu, “Pengukuran Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Dinas Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset (DPKPA) Kabupaten Minahasa Selatan,” *Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, vol. 4, no. 1, Apr 2016, doi: 10.35794/emba.4.1.2016.11759.
- [15] D. Antasena, Y. Crisstin, dan D. Silawati, “Efisiensi Dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah,” *Nian Tana Sikka : Jurnal ilmiah Mahasiswa*, vol. 1, no. 3, hlm. 51–70, Okt 2023, doi: 10.59603/niantanasikka.v1i3.49.
- [16] A. A. Lusiana dan Mahmudi, “Analisis Efisiensi Anggaran terhadap Program Kerja Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan T.A 2022,” *Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, vol. 2, no. 4, hlm. 54–62, Mar 2024, doi: 10.572349/neraca.v2i4.889.